

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
RAKONAS PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014

Batam, 19-21 Maret 2014

KESIMPULAN:

1. Di periode tahun pertama implementasi e-catalogue, masih ditemukan berbagai kendala teknis aplikasi, koordinasi, maupun kerjasama pabrikan-distributor sehingga menghambat proses penyediaan obat sesuai jadwal.
2. Sistem e-logistic merupakan inisiatif baik yang perlu dikembangkan melalui perbaikan aplikasi. Perbaikan perlu diarahkan kepada kemudahan pemanfaatan oleh pengguna (Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota), tidak semata untuk menyediakan laporan ketersediaan obat.
3. Uji mutu obat melalui sampling di instalasi farmasi Kabupaten/Kota/Provinsi perlu dikoordinasikan antara Balai POM dengan Dinas Kesehatan terkait, termasuk umpan balik hasil pengujian.
4. Implementasi Fornas dan pelaporan penggunaan obat secara berkala dapat mendorong kualitas pelayanan kefarmasian. Melalui pembinaan dan pengawasan terhadap kedua hal tersebut, pelaksanaan pelayanan kefarmasian diharapkan mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Pengelola program kefarmasian dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota siap berkoordinasi internal maupun eksternal dalam pemanfaatan sistem e-catalogue, e-watch, dan e-report alat kesehatan.
6. P4TO dan PED merupakan wahana yang berpotensi dikembangkan bila kerja sama lintas instansi terkait dijalin dengan baik. Keberadaan P4TO dan PED dapat mendukung kemandirian bahan baku obat tradisional maupun saintifikasi jamu bagi pelayanan kesehatan.
7. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota siap mendukung pelaksanaan dekonsentrasi dalam rangka mencapai sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional.

REKOMENDASI:

1. Perlunya perbaikan sistem e-logistic dan e-catalog untuk memperkuat manajemen obat dan BMHP dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Perlunya penyederhanaan format laporan untuk mendorong kualitas dan kepatuhan pelaporan pelayanan kefarmasian. Selain itu, kualitas pelayanan kefarmasian dapat didorong dengan pemanfaatan dana kapitasi JKN maupun pendidikan SDM kefarmasian secara berkelanjutan.

3. Untuk mendorong pemanfaatan sistem e-catalogue alkes, e-report, dan e-watch alat kesehatan, perlu dilakukan sosialisasinya yang mencakup peran masing-masing instansi dalam sistem tersebut. Pengelolaan alat kesehatan di daerah perlu dikoordinasikan dengan pelaksana program kefarmasian dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan.
4. Perlunya pengembangan P4TO dan PED secara komprehensif mulai dari hulu (penggunaan tanaman terstandar) sampai di hilir (pemanfaatan hasil P4TO dan PED oleh IOT dan IEBA), sesuai kewenangan instansi terkait.
5. Perlunya peningkatan kepatuhan pelaporan DAK melalui umpan balik dari Pusat maupun Dinas Kesehatan Provinsi. Dalam hal dekonsentrasi, diperlukan revisi menu dekonsentrasi sesuai hasil diskusi sehingga mendukung pencapaian sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Pada tahun 2015, pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilaksanakan di Sumatera Barat.